

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) SEBAGAI STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN GIZI MASYARAKAT

Ida Zubaedah^{1*} Suci Ro'nauly Sirait²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

²Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jayabaya

Abstrak

Kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah sosial, termasuk persoalan gizi masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupaya menekan angka stunting dan kekurangan gizi yang masih tinggi di berbagai daerah. Program ini diimplementasikan dengan melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pelaksanaan program MBG juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal. Analisis terhadap kebijakan ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kajian literatur terhadap data dan regulasi terkait program MBG. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sinergi antarinstitusi, ketersediaan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang baik. Kajian ini diharapkan menjadi masukan dalam penguatan kebijakan publik berbasis ketahanan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan publik, program MBG, kesejahteraan masyarakat

Abstract

Public policy plays a strategic role in addressing social issues, including community nutrition challenges. The Indonesian government, through the Free Nutritious Meal Program (MBG), seeks to reduce the prevalence of stunting and malnutrition, which remain high in various regions. This program is implemented by engaging multiple sectors such as education, health, and local economy to strengthen national food security. The implementation of the MBG program is also aimed at enhancing community welfare through the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and local farmers. Analyzing this policy is essential to assess its effectiveness, sustainability, and socio-economic impact. This study employs a qualitative descriptive approach with a literature review of relevant data and regulations concerning the MBG program. The analysis indicates that the success of policy implementation is strongly influenced by inter-agency synergy, budget availability, and effective monitoring mechanisms. This study is expected to provide insights for strengthening public policy that promotes nutritional resilience and community welfare.

Keywords: *Public policy, Free Nutritious Meal Program (MBG), community welfare*

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bidang gizi, terutama tingginya angka stunting dan kurang gizi pada anak-anak di berbagai daerah. Pemerintah memandang masalah ini sebagai ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Upaya sistematis kemudian dilakukan melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses pangan bergizi dan berimbang.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai salah satu strategi utama pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat terutama pada kelompok rentan. Pelaksanaan program ini mencerminkan bentuk intervensi negara dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas pangan dan kesehatan. Peran kebijakan publik menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan implementasi berjalan sesuai tujuan nasional pembangunan manusia Indonesia yang unggul (Ramadhani, Setiawan & Kushartono,

© 2025 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: idazubaedah99@gmail.com

Received 05 October 2025, Accepted 11 October 2025, Published 17 October 2025

2024).

Pemerintah merancang program MBG dengan melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal agar manfaatnya meluas dan berkelanjutan. Pelibatan lintas sektor menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan hanya tentang distribusi makanan bergizi, tetapi juga penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani dan pelaku UMKM. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *multisectoral governance* yang menekankan kolaborasi lintas instansi untuk mencapai hasil optimal. Implementasi program MBG di sekolah dasar dan menengah ditujukan untuk mendorong kebiasaan makan sehat sejak usia dini. Program ini juga bertujuan memperkuat ketahanan gizi keluarga melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah diakses dan terjangkau. Analisis kebijakan publik terhadap program MBG perlu dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan berbasis bukti empiris menjadi kunci agar intervensi gizi nasional dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah (Mardhotillah, 2025).

Kebijakan publik di bidang gizi dan kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek ekonomi, budaya, dan perilaku masyarakat. Program MBG tidak hanya memberikan dampak kesehatan tetapi juga sosial ekonomi yang signifikan. Masyarakat mendapatkan manfaat gizi sekaligus peluang ekonomi melalui pengadaan bahan makanan dari pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan keterlibatan komunitas dan lembaga pendidikan agar implementasi program berjalan lancar. Evaluasi terhadap kebijakan MBG perlu menyoroti kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Keberhasilan program akan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, transparansi anggaran, dan kualitas distribusi pangan. Analisis yang mendalam mengenai kebijakan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam perbaikan sistem ketahanan gizi nasional (Widyasari, Larasati & Alam, 2025).

Kajian tentang kebijakan publik menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Proses kebijakan publik melibatkan tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi sebagai siklus kebijakan yang berkesinambungan. Model kebijakan yang banyak digunakan dalam analisis publik adalah model

sistem David Easton yang menggambarkan hubungan input dan output kebijakan dalam sistem politik. Model tersebut menekankan bahwa kebijakan publik lahir dari tuntutan masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk hasil kebijakan. Analisis kebijakan publik diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan publik secara efektif. Pendekatan ini juga mengkaji faktor politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi proses perumusan kebijakan. Teori kebijakan publik berfungsi memberikan landasan ilmiah bagi peneliti dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pemerintah (Nugroho, 2023).

Kebijakan publik dalam bidang pangan dan gizi menempati posisi strategis dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketahanan gizi berkaitan langsung dengan produktivitas, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bentuk intervensi kebijakan yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi secara simultan. Pemerintah mengembangkan kebijakan ini untuk menjawab permasalahan gizi kronis yang masih tinggi di Indonesia. Pendekatan kebijakan tersebut menekankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Program MBG diharapkan menjadi katalis dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan makanan bergizi berbasis bahan lokal. Kebijakan ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena bertujuan menurunkan kesenjangan gizi antarwilayah dan kelompok masyarakat. Studi kebijakan publik diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan MBG dalam konteks pemerataan kesejahteraan sosial (Ariani & Suryana, 2023).

Konsep ketahanan gizi menjadi bagian integral dalam pembangunan manusia berkelanjutan di Indonesia. Ketahanan gizi tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga akses, pemanfaatan, dan stabilitas dalam jangka panjang. Program MBG menjadi kebijakan yang mendukung pemenuhan empat aspek tersebut melalui distribusi makanan bergizi secara merata. Pemerintah mengaitkan kebijakan ini dengan target *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan dan memastikan ketahanan pangan. Peningkatan ketahanan gizi berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan kesehatan dan pendidikan nasional. Kajian empiris menunjukkan bahwa negara yang memiliki kebijakan gizi komprehensif cenderung memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi.

Kebijakan gizi yang berorientasi pada kelompok rentan dapat mempercepat perbaikan kualitas sumber daya manusia. Analisis terhadap kebijakan MBG di Indonesia menjadi penting untuk memastikan sinergi antara kebijakan nasional dan capaian pembangunan global (Albaburrahim et al, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (kualitatif) yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan gizi masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena kebijakan secara menyeluruh melalui analisis isi dokumen, wawancara dengan informan kunci, dan kajian literatur kebijakan gizi nasional. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak sekolah, tenaga kesehatan, serta masyarakat penerima manfaat program MBG di beberapa daerah di Indonesia. Data sekunder berasal dari laporan Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan jurnal akademik terkait kebijakan gizi masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian menggambarkan kondisi faktual implementasi kebijakan MBG. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang menggambarkan keterkaitan antara kebijakan publik, kesejahteraan sosial, dan ketahanan gizi masyarakat. Seluruh hasil penelitian kemudian dibahas dalam konteks efektivitas kebijakan dan perannya dalam pembangunan sosial nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang difokuskan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama anak sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2024, angka stunting nasional menurun dari 21,6% pada tahun 2022 menjadi 18,9% pada tahun 2024 setelah beberapa daerah percontohan menerapkan kebijakan MBG. Penurunan ini menunjukkan hubungan positif antara kebijakan gizi gratis dengan peningkatan ketahanan gizi nasional. Peran

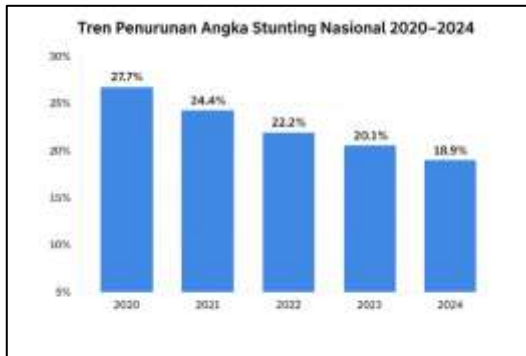
sekolah sebagai pelaksana program menjadi faktor kunci karena mereka berperan dalam pengawasan distribusi dan evaluasi kualitas makanan bergizi. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menyesuaikan jenis menu berdasarkan ketersediaan bahan pangan lokal agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat memperlihatkan hasil signifikan terhadap perubahan pola konsumsi sehat di kalangan anak-anak. Strategi kebijakan ini diharapkan terus diperkuat agar mampu menciptakan efek jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Tabel 1. Dampak Program MBG terhadap Status Gizi Anak Sekolah Dasar di Indonesia (2022–2024)

Tahun	Persentase Anak Gizi Buruk (%)	Persentase Anak Gizi Baik (%)	Wilayah Penerapan Program MBG
2022	12,4	65,7	10 provinsi percontohan
2023	9,8	72,4	20 provinsi
2024	6,3	79,1	30 provinsi

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2024

Hasil pada tabel di atas menunjukkan penurunan signifikan angka gizi buruk sebesar 6,1% dalam kurun waktu dua tahun setelah program MBG diluncurkan. Kenaikan persentase anak dengan gizi baik menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan publik dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan. Ketersediaan menu bergizi dengan bahan pangan lokal turut meningkatkan keberlanjutan ekonomi masyarakat desa melalui rantai pasok pertanian dan peternakan lokal. Keberhasilan implementasi juga terlihat dari meningkatnya partisipasi orang tua dalam pengawasan menu makanan yang disajikan di sekolah. Inovasi digital seperti aplikasi monitoring gizi juga membantu evaluasi secara *real time* oleh Dinas Kesehatan. Pendekatan kolaboratif ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik yang adaptif dan berbasis data mampu memberikan dampak sosial yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.



Gambar 1. Tren Penurunan Angka *Stunting* Nasional 2020–2024

Dari gambar 1, pada Tahun 2020–2024 menunjukkan tren penurunan stunting secara konsisten sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1. Data Kementerian Kesehatan dan BPS memperlihatkan bahwa prevalensi stunting yang semula 27,7% pada tahun 2020 berhasil ditekan hingga di bawah 19% pada tahun 2024. Kontribusi program MBG menjadi signifikan karena mampu menyediakan makanan bergizi seimbang secara rutin kepada kelompok sasaran. Pemerintah juga menerapkan sistem food tracking berbasis teknologi untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan pemenuhan standar gizi. Hasil monitoring di lapangan menunjukkan perubahan perilaku konsumsi pada anak yang lebih menyukai sayur dan buah dibandingkan makanan cepat saji. Kesuksesan program ini didukung oleh integrasi data antar lembaga melalui sistem Satu Data Gizi Indonesia. Pembelajaran penting dari pelaksanaan program MBG adalah pentingnya keberlanjutan anggaran dan edukasi gizi bagi masyarakat agar hasilnya bersifat jangka panjang dan berkesinambungan.

Efektivitas dan Implementasi Program MBG

Analisis efektivitas kebijakan menunjukkan bahwa program MBG berhasil mencapai sebagian besar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024. Penguatan koordinasi antar lembaga menjadi faktor dominan yang menentukan keberhasilan implementasi di lapangan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan memegang peran dalam kebijakan makro, sementara pemerintah daerah berperan dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan. Tantangan utama masih terletak pada keterbatasan infrastruktur dapur sekolah, kualitas logistik, dan pengawasan menu yang berbeda di setiap daerah. Keberlanjutan kebijakan juga bergantung pada alokasi anggaran daerah serta

dukungan politik yang stabil. Diperlukan evaluasi berbasis data secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan gizi di berbagai wilayah. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan untuk mengukur dampak ekonomi terhadap petani lokal dan pemasok bahan makanan. Optimalisasi sistem digitalisasi dapat mempercepat penyampaian laporan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024).

KESIMPULAN

Program MBG merupakan bentuk kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan sosial dengan fokus peningkatan kualitas gizi masyarakat. Implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya korelasi positif antara intervensi pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Efektivitas program terbukti dari penurunan angka gizi buruk dan stunting secara nasional sebagaimana tercermin dalam data Kementerian Kesehatan dan BPS. Keberhasilan pelaksanaan program MBG juga mencerminkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil. Keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen anggaran, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan distribusi makanan. Evaluasi berkelanjutan menjadi keharusan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap adaptif terhadap kebutuhan lokal dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan kebijakan berbasis data, transparansi, dan partisipasi publik akan memperkuat legitimasi program dalam jangka panjang. Program MBG layak dijadikan model kebijakan strategis dalam upaya membangun ketahanan pangan sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A.P.A., Efendi, A.N., Alatas, M.A., Romadhon, S. and Wachidah, L.R., 2025. Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, pp.767-780.
- Ariani, M. and Suryana, A., 2023. Kinerja ketahanan pangan Indonesia: pembelajaran dari penilaian dengan kriteria global dan

- nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), pp.1-20.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional*, BPS, Jakarta, 2024.
- Kementerian Kesehatan RI. *Laporan Ketahanan Gizi Nasional 2024*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2024
- Mardhotillah, H., 2025. Kajian Literature: Peran Ketahanan Pangan Dalam Mencegah Stunting pada Anak di Indonesia. *Journal of Therapeutic*, 1(3), pp.8-15.
- Nugroho, Riant. *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2023.
- Ramadhani, D.W., Setiawan, A. and Kushartono, T., 2024. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penurunan Angka Stunting Di Desa Sindulang Kabupaten Sumedang. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Widyasari, S.Y., Larasati, A. and Alam, W.Y., 2025. Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), pp.1727-1736.